

**ETOS KERJA MANUSIA BUGIS-MAKASSAR
SEBAGAI KRITIK TERHADAP KONSEP KERJA
DALAM BUDAYA KAPITALISME BARU
(Studi Filosofis Atas Persoalan Pengangguran di Indonesia)**

Oleh: Abdul Rokhmat Sairah Z.¹

Abstract

Various practices of the new capitalism implicitly exist in Indonesia. The practices are consumption tendencies and consequence of inequality in economy. This essay aims to explore work ethics of Bugis-Makassar people as a critique to work concept in the new capitalism and its relevance on unemployment problem in Indonesia. This essay shows that the unemployment problem in Indonesia is influenced by the work concept in the new capitalism. The new capitalism uses a culture as a tool to legitimate power and causes instability in labor system. Indonesia government must be able to face the new capitalism practices and return to a local wisdom to solve the unemployment problem.

Keywords: work ethics, Bugis-Makassar people, work concept, new capitalism, unemployment problem, local wisdom.

A. Pendahuluan

Salah satu persoalan utama di Indonesia saat ini ialah tingginya angka pengangguran. Persoalan pengangguran dapat berdampak pada berbagai bidang kehidupan lain. Angka pengangguran sering kali berbanding lurus dengan angka kriminalitas. Begitu juga halnya dengan angka kemiskinan, semakin tinggi angka pengangguran maka semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin. Pengangguran juga tidak jarang menjadi pemicu persoalan ketegangan antar pendukung tim sepakbola. Demikian juga dengan berbagai ketegangan lain yang mungkin timbul karena beban sosial yang dipikul seorang penganggur lebih besar. Oleh karena itu, persoalan ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Pemerintah mencatat penganggur pada Agustus 2010 sebanyak 8,32 juta orang, turun 0,64 juta orang dibanding Agustus

¹ Staf Pengajar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

2009 (8,96 juta orang) dan turun 0,27 juta orang dibanding Februari 2010 (8,59 juta orang). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2010 sebesar 7,14 % lebih rendah dibanding Agustus 2009 (7,87 %) dan lebih rendah dibanding Februari 2010 (7,41 %). Meskipun demikian, angka ini masih tergolong tinggi dengan kondisi negara saat ini. Angka ini diperoleh berdasarkan data dari penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterbitkan pada bulan Maret 2011. Data diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Pengumpulan data berbasis sampel dengan pendekatan rumah tangga.

Cara untuk memperoleh angka pengangguran di Indonesia bukan fokus persoalan dalam pembahasan ini, akan tetapi lebih kepada penyebab dan upaya untuk menanggulangnya. Pengangguran tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja. Lapangan kerja yang kurang memadai bukanlah faktor utama yang menyebabkan angka pengangguran yang tinggi. Akan tetapi, saat ini terdapat satu struktur abstrak yang membudaya dan secara sistemik membuat dunia kerja menjadi tidak stabil. Budaya tersebut terindikasi sebagai penyebab utama persoalan pengangguran.

Michael Storper (2001: 88), penulis *Lived Effects Of The Contemporary Economy: Globalization, Inequality, and Consumer Society* dalam **Millenial Capitalism and The Culture Of Neoliberalism**, menyatakan bahwa saat ini hampir pada semua tempat dapat ditemukan fenomena globalisasi, peningkatan jurang kesenjangan ekonomi, persetujuan terhadap masyarakat yang berbasis kelas, serta konsumerisme yang intensif. Pernyataan Storper secara tidak langsung relevan dalam konteks persoalan pengangguran di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam persoalan upah minimum pekerja di Indonesia. Persoalan upah minimum provinsi (UMP) merupakan polemik yang menunjukkan kesewenangan pemilik modal dan pemerintah terhadap para pekerja (Sairah, 2010: 3). Kesewenangan itu diakibatkan oleh tidak berimbangnya kekuatan ekonomi antara pekerja dan pemilik modal, yang membuktikan bahwa terdapat jurang kesenjangan ekonomi antara pekerja dan pemilik modal. Inilah efek dari kapitalisme yang telah menggurita di seluruh dunia.

Ada sebuah kritik yang tidak populer yang menyatakan bahwa sejarah kapitalisme adalah sejarah kesewenangan, kesenjangan ekonomi, “penjajahan” gaya baru, perang, dan persoalan lingkungan hidup yang akut, dan berbagai macam

bencana sosial lainnya. Barangkali persoalan terbesar saat ini adalah eksistensi budaya kapitalisme baru.

Konsep tentang budaya kapitalisme baru secara otentik dikemukakan pertama kali oleh Richard Sennet pada tahun 2006. Ia adalah seorang sosiolog dari Yale *University* di Amerika. Sennet memaparkan kebudayaan berdasar atas konteks kemampuan manusia dalam lingkungan sosial sebagai subjek dalam masyarakat. Sennet mengemukakan tentang bagaimana budaya kapitalisme baru telah menghancurkan nilai-nilai dasar kemampuan manusia ke dalam bentuk kepentingan konsumsi. Budaya ini memiliki pola yang sama pada hampir seluruh penjuru dunia, khususnya pada negara-negara berkembang.

Budaya yang dimaksud Sennett lebih diartikan "budaya" secara antropologis-sosiologis, bukan budaya dalam arti benda-benda artistik. Sennet melihat labirin persoalan dalam mencari nilai-nilai dan praktek yang dapat mengendalikan orang per orang secara bersama-sama sebagai lembaga tempat mereka bertempat tinggal secara terpisah. Sennet (2006: 3) menyatakan bahwa generasi sekarang berangan-angan untuk menjawab persoalan ini dengan harapan untuk dapat meningkatkan kebaikan masyarakat dalam skala kecil. Masyarakat bukan satu-satunya cara bagi satu lembaga untuk menjadi sebuah budaya. Contoh yang paling jelas ialah orang asing yang tinggal di sebuah kota. Mereka menghuni satu kebudayaan umum meskipun mereka tidak tahu satu sama lain. Masalah kebudayaan lebih dari sekedar masalah ukuran.

Sennet (2006: 3) menyatakan bahwa hanya jenis manusia tertentu yang dapat makmur dalam keadaan tidak stabil dan kondisi sosial yang terfragmentaris. Manusia ideal harus mengatasi tiga tantangan. Tantangan pertama ialah bagaimana mengelola diri sendiri dalam hubungan yang singkat karena perubahan dari tugas ke tugas, pekerjaan ke pekerjaan, dan satu tempat ke tempat lain. Jika tidak ada lagi lembaga yang menyediakan kemampuan jangka panjang, individu harus dapat berimprovisasi atau bahkan melakukan rutinitas tanpa kesadaran diri.

Tantangan kedua ialah menyangkut bakat. Bagaimana mengembangkan keterampilan baru, bagaimana kemampuan menggali potensi sebagai realitas tuntutan perubahan. Praktis, dalam kehidupan ekonomi modern, tak banyak keterampilan yang dihasilkan, dalam teknologi dan ilmu, seperti dalam bentuk manufaktur maju. Bakat juga merupakan masalah budaya. Tatanan sosial muncul dari cita-cita untuk mengerjakan yang terbaik, yaitu,

belajar untuk melakukan satu hal benar-benar baik; komitmen tersebut sering kali dapat membuktikan secara ekonomis destruktif. Gagasan modern me-ritokrasi tentang kemajuan budaya lebih menekankan kemampuan potensi ketimbang prestasi masa lalu (Sennet, 2006: 5).

Tantangan ketiga menyangkut persoalan penyerahan. Sennet (2006:5) menjelaskan bahwa tantangan ini menyangkut tentang bagaimana seseorang melepaskan masa lalu. Seorang kepala sebuah perusahaan yang dinamis bahkan menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki jaminan tempat dalam organisasinya, jasa pada masa lalu tidak memberikan jaminan tempat khusus bagi karyawan. Sennet menjelaskan bahwa orang-orang berusaha menjadi manusia ideal ini. Institusi baru memberikan syarat untuk kebudayaan ideal dan merusak banyak orang yang tidak sesuai dengan mereka.

Fenomena budaya yang demikian ketat dikendalikan oleh sekelompok kecil penguasa di muka bumi ini perlu dikritisi. Kendali itu secara tidak langsung telah mengekang kebebasan manusia untuk berkreasi sebagaimana kodratnya. Karya kecil ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong bangkitnya diskursus lebih lanjut. Konsep kerja dalam budaya kapitalisme baru secara sekilas telah diuraikan dalam penjelasan di atas, akan tetapi belum menyentuh persoalan yang lebih jauh. Oleh karena itu, berikut akan dibahas terlebih dahulu latar kemunculan istilah “kapitalisme baru” itu sendiri.

B. Perdebatan tentang Istilah “Kapitalisme Baru”

Penggunaan istilah “kapitalisme baru” masih menjadi perdebatan. Beberapa teoritis menganggap istilah ”baru” pada kapitalisme tidak sepenuhnya dapat diterima. Penjelasan tentang penggunaan istilah ”baru” dan ”lama” ini penting untuk dipahami terlebih dahulu guna membatasi lingkup pembahasan. Pernyataan di atas mengandung maksud bahwa untuk mengetahui konsep kerja dalam budaya kapitalisme baru perlu ditelaah terlebih dahulu perbedaan antara kapitalisme lama dengan kapitalisme baru yang berkembang dewasa ini. Perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai fenomena pola budaya kapitalisme dewasa ini, yang dapat diamati secara langsung dalam kehidupan, dan membandingkannya dengan pola kapitalisme lama dalam tradisi kapitalisme.

Kapitalisme merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut sistem ekonomi setelah runtuhnya feodalisme.

Kapitalisme sebagai sistem baru berkembang sejak abad ke-16, namun asal-usul lembaga kapitalisme sudah terdapat sejak zaman kuno (Dillard, 1987: 15). Perkembangan kapitalisme menjadi sejumlah tahap, yang ditandai dengan berbagai tingkat kedewasaan dan masing-masing dapat dikenali dengan ciri pembawaan yang cukup khas. Masa awal kapitalisme ialah pada waktu terjadi perubahan cara produksi, yaitu dikuasainya produsen secara langsung oleh seorang kapitalis.

Dobb (1987: 53) menyatakan bahwa kapitalisme dapat ditetapkan berawal di Inggris pada paruh akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 ketika modal mulai menembus produksi dalam jumlah besar. Perkembangan kapitalisme ditandai dengan dua masa yang cukup menentukan. Pertama, masa revolusi *Cromwellian* pada abad ke-17 ketika terjadi perubahan politik dan sosial, serta pergulatan di dalam perusahaan-perusahaan kontrak. Masa ini ialah waktu ketika terjadi perlawanan parlemen di Inggris terhadap monopoli. Kedua, masa revolusi industri pada akhir abad ke-18 dan paruh awal abad ke-19. Masa ini dianggap sebagai kelahiran kapitalisme modern. Alasannya ialah karena masa ini mempunyai signifikansi ekonomis yang begitu menentukan bagi keseluruhan masa depan ekonomi kapitalis. Masa ini ditandai dengan terjadinya transformasi radikal struktur dan organisasi industri.

Sejarawan Brauel dalam Rahardjo (1987: xx) menyatakan bahwa kapitalisme telah banyak berubah dan akan senantiasa berubah, yang sekaligus menjadikan perubahan itu sebagai kemampuan dan keistimewaan kapitalisme. Kapitalisme sekilas tampak berubah tetapi esensinya tetap. Perubahan kapitalisme dapat ditemukan hanya pada tataran permukaan saja, atau dengan kata lain perubahan itu hanya berupa perubahan bentuk dan sifat perwujudannya. Kapitalisme saat ini pun pada esensinya tidak berbeda dengan kapitalisme pada zaman kuno.

Prinsip dasar kapitalisme ialah akumulasi kapital, persaingan bebas, dan rasionalitas (Rahadjo, 1987: ix). Prinsip ini melandasi segala aspek pemikiran dan tindakan dalam berbagai bidang kehidupan yang secara simultan berlanjut hingga membentuk budaya kapitalisme baru (Sairah, 2010: 182). Rahardjo (1987: xxxix) menyatakan bahwa penyelidikan mengenai kapitalisme sama dengan menyelidiki ekonomi. Pemahaman tentang kapitalisme, bagaimana proses kelahiran, perkembangannya pada masa lalu, dan wujudnya dari masa ke masa, dengan demikian

dapat diselidiki dengan meneliti perkembangan perekonomian dan perdagangan dari masa ke masa.

Prinsip pasar menjadi nilai untuk mengevaluasi berbagai tindakan dan kebijakan pemerintah satu negara. Kapitalisme yang berkembang belakangan ini pada prinsipnya menuntut kinerja pasar bebas sebagai satu-satunya ukuran untuk menilai keberhasilan kebijakan pemerintah. Pasar bebas menjadi “pengadilan” di dalam kebudayaan dan kehidupan manusia.

Rokhmat Sairah (2010: 73) menyatakan bahwa berdasarkan perkembangan kapitalisme dapat dikemukakan beberapa pandangan. Pertama, kapitalisme hadir pertama kali ketika manusia mulai mengenal perdagangan atau proses pertukaran. Kedua, konsep dalam aliran ini berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan manusia. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kemampuan penguasaan teknologi manusia, semakin pesat juga perkembangan paham ini. Ketiga, perkembangan paham ini ditandai dan dipengaruhi oleh pemikiran dari perorangan maupun kelompok kecil yang menggerakkannya. Contoh yang membuktikan hal itu ialah ketika Adam Smith dengan karyanya mampu membuka pandangan manusia tentang esensi aktivitas ekonomi dan ilmu ekonomi, ia sendiri tidak terlepas dari pengaruh kaum fisiokratisme yang cukup kuat pada masa itu.

Karl Marx adalah tokoh yang terkenal menulis tentang kapitalisme pada 165 tahun yang lalu. Versinya bahwa “modernitas cair” (*liquid modernity*) berasal dari masa lalu yang ideal. Ketidakstabilan sejak masa Marx mungkin menampakkan kapitalisme hanya bersifat konstan. Pergolakan pasar, kelihaihan spekulasi investor, tiba-tiba naik kemudian jatuh, gerakan buruh pabrik, migrasi massal pekerja mencari pekerjaan yang lebih baik atau pekerjaan lain menggambarkan energi kapitalisme abad ke-19, dan diramalkan oleh sosiolog Joseph Schumpeter dalam ungkapan terkenal: “penghancuran kreatif” (*creative destruction*). Hari ini ekonomi modern tampaknya hanya penuh dengan energi tidak stabil ini, karena penyebaran global produksi, pasar, pembiayaan dan munculnya teknologi baru (Sennet, 2006: 15).

Perdebatan yang mungkin tentang istilah “baru” dalam kapitalisme adalah globalisasi. Sosiolog Leslie Sklair dalam Sennet (2006: 17) berpendapat, dengan berasumsi pada kesejahteraan ekonomi, bahwa globalisasi hanya perluasan perusahaan multinasional pada pertengahan abad ke-20. Sennet (2006: 17) menyatakan bahwa perdebatan ini lebih dari sekedar persoalan

keadaan ekonomi. Perusahaan multinasional dulu terjalin dengan politik negara-bangsa. Korporasi global saat ini memiliki investor dan pemegang saham dari seluruh dunia dan struktur kepemilikan yang rumit untuk melayani kepentingan nasional satu negara. Kasus yang paling radikal ialah bahwa bangsa-bangsa kehilangan nilai ekonomi mereka.

Pendukung istilah “baru” mengasumsikan bahwa Marx mendapat sejarah kapitalisme yang salah. Kesalahan Marx karena percaya pada kehancuran kreatif (*creative destruction*) yang konstan. Para pengkritiknya berpandangan, sistem kapitalis segera mengoreksi berbagai kesalahannya. Awalnya, rutinitas pabrik dikombinasikan dengan anarki pasar saham, tetapi pada akhir abad ke-19, anarki telah mereda dan struktur birokrasi menjadi kaku dalam perusahaan (Sennet, 2006: 21).

Pabrik pada awal abad ke-19 menggabungkan antara rutinitas yang membekukan pemikiran dengan pekerjaan yang tidak stabil. Pengaruh untuk melindungi pekerja masih minim. Bisnis swasta sering kurang terstruktur dan begitu mungkin untuk tiba-tiba bangkrut. Berdasarkan satu penelitian, 40 % angkatan kerja berbadan sehat di London menganggur pada tahun 1850, tingkat kegagalan bisnis-baru mencapai 70 %. Sebagian besar perusahaan di tahun 1850-an tidak mempublikasikan laporan operasional mereka, dan prosedur akuntansi cenderung hanya berupa laporan rugi-laba sederhana. Pengoperasian siklus bisnis tidak dipahami secara statistik hingga akhir abad ke-19. Keadaan inilah yang menjadi data dalam pemikiran Marx ketika menggambarkan tatanan material industri dan ketidakstabilan mental.

Sennet, (2006: 21) menyebut kapitalisme ini sebagai “kapitalisme primitif” yang terlalu rentan untuk bertahan hidup secara sosial dan politik. Kapitalisme primitif adalah sebuah jalan untuk terjadinya revolusi. Perusahaan mulai belajar seni stabilitas, menjamin umur panjang bisnis dan meningkatkan jumlah pekerja, selama jangka waktu seratus tahun, dari 1860-an hingga 1970-an. Pasar bebas bukan merupakan efek perubahan stabilisasi ini, melainkan sebagai cara bisnis yang dengan organisasi internalnya memainkan peran yang lebih signifikan. Mereka terselamatkan dari revolusi karena menerapkan model organisasi militer untuk kapitalisme.

Pernyataan di atas didasarkan pada analisis Max Weber tentang militerisasi masyarakat sipil pada akhir abad ke-19. Weber (1959:29) menyatakan bahwa kapitalisme yang telah mendominasi

kehidupan perekonomian, mendidik dan memilih insan-insan ekonomi yang dibutuhkanannya melalui *survival of the fittest* dalam bidang ekonomi. Seseorang akan dapat dengan mudah melihat batas-batas konsep seleksi sebagai sarana penjelasan historis. Agar satu cara hidup (yang demikian baik beradaptasi dengan kekhususan kapitalisme) dapat terpilih, berarti dapat mendominasi yang lainnya, cara hidup itu harus berasal-usul, bukan saja dalam individu-individu terpisah, tetapi cara hidup yang diikuti oleh keseluruhan kelompok manusia.

Perusahaan transnasional beroperasi semakin seperti tentara, di mana setiap orang memiliki tempat, dan masing-masing tempat memiliki fungsi yang telah ditetapkan. Weber, yang kala itu masih muda, menyaksikan dengan campuran emosi pertumbuhan baru Jerman Bersatu. Tentara Prusia selama berabad-abad memiliki reputasi legendaris untuk efisiensi. Tentara Eropa pada umumnya, kala itu, terus membelanjakan anggaran mereka untuk perwira, tidak peduli pada kemampuan mereka, dan memberikan pelatihan konvensional pada prajurit biasa. Hal itu yang membedakan dengan militer Prusia. Rantai komandonya lebih ketat daripada militer Perancis dan Inggris, tetapi kekakuan tugas setiap tingkat dalam rantai komando didefinisikan dengan lebih logis.

Model militer Otto von Bismarck di Jerman ini mulai diterapkan untuk bisnis dan lembaga-lembaga masyarakat sipil, terutama (dalam pandangan Bismarck) untuk perdamaian dan pencegahan revolusi. Tidak peduli seberapa miskin dia, para pekerja yang tahu bahwa ia memiliki posisi yang mapan cenderung kurang untuk memberontak daripada pekerja yang tidak mengetahui posisinya dalam masyarakat. Ini adalah pendirian politik apa yang dapat disebut “kapitalisme sosial”.

Asal-usul militer yang menyerupai gambaran sebuah sangkar besi menunjukkan birokrasi dibangun untuk mengatasi pergolakan dalam usaha mempertahankan hidup (*survival*). Sennet (2006: 31) menganggap analisis Weber tentang struktur yang dirancang untuk kapitalisme sosial Bismarck begitu cemerlang. Warisan terbesar dari Weber adalah pemahaman tentang waktu yang terorganisasi. Semua hubungan sosial membutuhkan waktu untuk mengembangkan sebuah cerita kehidupan, ketika individu yang penting bagi orang lain memerlukan sebuah institusi dengan masa hidup yang panjang. Birokrasi dengan demikian memiliki arti yang sama dengan stabilitas dan solidaritas. Hal itu adalah benar-benar sebuah ilusi. Kapitalisme sosial telah terbukti rapuh. Struktur

birokrasi saat ini telah ditantang dengan cara yang tidak bisa diramalkan oleh Bismarck dan Weber sebelumnya.

Sennet (2006: 38) menyatakan bahwa muncul “tiga halaman baru” pada akhir abad ke-20 yang tampaknya menyarankan bahwa kapitalisme sosial akan menjadi kenangan nostalgia. Pertama, telah terjadi pergeseran kekuasaan dari manajerial kepada pemegang saham di perusahaan-perusahaan besar. Surplus besar modal untuk investasi mendesak untuk dilepaskan pada skala global ketika kesepakatan *Bretton Woods* gagal di awal 1970-an. Kekayaan yang telah dibatasi untuk lokal atau perusahaan nasional atau disimpan di bank-bank nasional dapat lebih mudah bergerak mengelilingi dunia.

Pergeseran dalam kekuasaan menghasilkan halaman baru kedua. Investor lebih menginginkan hasil jangka pendek daripada hasil jangka panjang. Investor lebih menganggap penting harga saham daripada dividen sebuah perusahaan sebagai ukuran hasil mereka. Pembelian dan penjualan saham di pasar saham secara terbuka, menghasilkan keuntungan lebih cepat dan lebih besar daripada memegang saham untuk jangka panjang. Dampak keseluruhan dari begitu banyak mengeluarkan modal dan tekanan keuntungan jangka pendek mengubah struktur institusi yang harus tampil menarik untuk penguatan investor. Tekanan besar diletakkan pada perusahaan untuk tampil menawan di mata calon investor yang lewat. Daya tarik institusi terdapat dalam kemampuan untuk menunjukkan tanda-tanda perubahan internal dan fleksibilitas, tampak sebagai perusahaan yang dinamis, bahkan jika perusahaan tersebut telah stabil dan bekerja dengan baik secara sempurna sekalipun.

Halaman baru ketiga terletak pada pengembangan teknologi komunikasi baru dan manufaktur. Komunikasi pada skala global menjadi lebih cepat (*instant*). Orang yang berada dalam institusi, memandang revolusi komunikasi memiliki makna berbeda. Pertumbuhan teknologi komunikasi berarti informasi dapat dirumuskan dengan jelas dan menyeluruh, disebarluaskan dalam versi aslinya ke seluruh perusahaan. Salah satu konsekuensi dari revolusi informasi dengan demikian ialah untuk menggantikan modulasi dan interpretasi perintah oleh jenis baru sentralisasi.

Pendapat Sennet di atas kemudian diperkuat dengan pandangan Stephen Rousseas dalam Dowd (2000: 163-164), ia mengemukakan beberapa prinsip dasar ekonomi pasca-Keynesian adalah sebagai berikut.

1. Ketidakpastian yang mudah menyebar dibedakan dengan risiko yang mungkin dihitung;
2. Periode historis ketika produksi dan semua peristiwa ekonomi mengambil tempat dalam gaya tidak dapat diubah;
3. Keberadaan ekonomi kredit uang dari kontrak di muka ketika jumlah uang beredar telah hampir mencapai biaya produksi yang nihil;
4. Penetapan harga produk individu sebagai *mark-up* atas unit perdana di sektor biaya oligopolistis yang dominan beroperasi dengan merencanakan kelebihan kapasitas;
5. Analisis permintaan-penawaran yang tidak relevan dengan pasar tenaga kerja, dan kunci ketergantungan dari tingkat harga umum pada angka upah nominal ditentukan oleh tawar-menawar kolektif;
6. Sifat endogen jumlah uang beredar; dan
7. Ketidakstabilan inheren dalam kapitalisme.

Sejarah panjang kapitalisme ini menunjukkan bahwa kapitalisme memandang manusia pada hakikatnya adalah manusia ekonomi atau *Homo Economicus*. Dengan kata lain, Ontologi Kapitalisme adalah manusia yang senantiasa berusaha mengumpulkan dan menumpuk nilai material. Ontologi kapitalisme merupakan basis dari penyelidikan bidang filsafat lainnya tentang kapitalisme (Saksono, 2009: 142).

C. Kerja menurut Kapitalisme Baru dan Defisit Sosial

Max Weber (1959: 51) menyatakan bahwa sistem kapitalis begitu membutuhkan kepatuhan terhadap satu tuntutan untuk menumpuk kekayaan. Hal ini merupakan satu sikap terhadap barang-barang material yang begitu sesuai dengan sistem itu, dan begitu erat terikat dengan kondisi kelangsungan hidup, yang saat ini tidak disangsikan lagi adanya satu hubungan yang perlu antara sikap hidup tamak dari kehidupan itu dengan salah satu dari *weltanschauung*.

Sennet (2006: 41) melihat otomatisasi (sebagai sisi lain dari revolusi teknologi) telah mempengaruhi piramida birokrasi, dengan satu cara yang mendalam, yaitu dasar dari sebuah institusi tidak perlu lagi besar. Organisasi sekarang dapat secara efisien melepaskan pekerjaan rutin berkat inovasi seperti sebagai pembaca *barcode*, teknologi pengenalan suara, *scanner* objek tiga dimensi, serta *micromachines* yang melakukan kerja jari. Jumlah tenaga

kerja dapat dikurangi. Seorang individu dituntut terus-menerus belajar keterampilan baru, mengubah pengetahuan dasarnya. Idealitas itu dalam realitas didorong oleh perlunya keterampilan di depan mesin.

Ketiga halaman baru yang telah digambarkan di atas berlaku hanya untuk beberapa jenis birokrasi ekonomi. Arsitektur institusi baru lebih mirip dengan mesin modern yang unik daripada bentuk bangunan tradisional seperti piramida. Struktur baru ini melakukan seperti *MP3 player*. Mesin *MP3* yang dapat diprogram untuk hanya memainkan beberapa *band* dari *repertoar*, hal yang sama dengan organisasi fleksibel yang dapat memilih dan melakukan hanya beberapa dari banyak kemungkinan fungsi pada waktu tertentu. Urutan produksi dalam organisasi yang fleksibel juga dapat divariasikan sesuai keinginan.

Kerja lebih berorientasi kepada tugas daripada fungsi tetap tenaga kerja. Perkembangan linear digantikan dengan pola pikir bersedia untuk melompat-lompat. Cara kerja baru ini mengizinkan apa yang disebut penghapusan lapisan institusi. Manajer dapat menyingkirkan lapisan dalam organisasi dengan *outsourcing* beberapa fungsi pada perusahaan lain atau tempat lain. Organisasi dan kontrak membengkak, karyawan ditambahkan dan dibuang seperti perusahaan bergerak dari satu tugas ke tugas yang lain.

Peningkatan angkatan kerja mengacu untuk lebih menggunakan pekerja sementara dari luar atau subkontraktor, itu berlaku untuk struktur internal perusahaan. Karyawan dapat diadakan untuk kontrak tiga atau enam bulan, sering diperbarui jika telah melewati masa setahun. Majikan dengan demikian dapat menghindari membayar manfaat mereka seperti perawatan kesehatan atau pensiun. Lebih dari itu, pekerja kontrak pendek dapat lebih mudah berpindah dari tugas ke tugas, kontrak diubah untuk disesuaikan dengan perubahan kegiatan perusahaan. Perusahaan dapat secara cepat melakukan kontrak dan memperluas, pelepasan atau penambahan personel.

Perubahan struktural yang terlibat dalam membongkar sangkar besi birokrasi menghasilkan tiga defisit sosial. Tiga defisit perubahan struktural yaitu rendahnya kesetiaan (*loyalitas*) institusi, berkurangnya kepercayaan informal di antara pekerja, dan melemahnya pengetahuan institusional (Sennet 2006: 49). Setiap defisit sosial ini tampak nyata dalam kehidupan pekerja biasa. Mereka saling berhubungan satu sama lain dalam hal sebagai alat intelektual yang abstrak. Kesetiaan adalah unsur penting dalam

usaha mempertahankan siklus bisnis, modal sosial yang rendah menjadi hal yang paling praktis untuk perusahaan dalam upaya melawan predator. Defisit kesetiaan bagi karyawan memperparah stres, terutama karena bekerja lama.

Defisit sosial kedua menyangkut masalah kepercayaan. Kepercayaan datang dalam dua bentuk, formal dan informal. Kepercayaan formal berarti salah satu pihak masuk kontrak, ia percaya bahwa pihak lain akan menghormati pada ketentuan kesepakatan. Kepercayaan informal adalah masalah mengetahui siapa yang dapat diandalkan, terutama ketika sebuah kelompok berada di bawah tekanan. Kepercayaan informal membutuhkan waktu untuk berkembang. Dalam sebuah tim atau jaringan, petunjuk kecil tentang perilaku dan karakter muncul hanya secara bertahap. Waktu untuk mengembangkan pemahaman tentang orang lain sering kurang pada birokrasi yang berorientasi jangka pendek.

Defisit sosial ketiga menyangkut melemahnya pengetahuan institusional. Salah satu wakil dari piramida birokrasi lama yaitu kekakuan, kantornya tetap, orang mengetahui apa yang secara pasti dan apa yang diharapkan dari mereka. Keutamaan piramida yaitu akumulasi pengetahuan tentang bagaimana membuat sistem kerja, yang berarti tahu kapan harus membuat pengecualian aturan atau merencanakan kembali pengaturan saluran. Reformasi birokrasi piramida ini menyebabkan fungsionaris tingkat rendah sering kali menjadi orang pertama yang dilepaskan. Manajemen membayangkan bahwa teknologi komputerisasi dapat mengambil tempat mereka, namun sebagian besar perangkat lunak bisnis lebih pada menerapkan dibanding menyesuaikan aturan.

Salah satu cara untuk menyimpulkan berbagai masalah fenomena budaya kapitalisme baru ialah sebagai berikut. Erosi kapitalisme sosial telah menciptakan formulasi baru ketidaksetaraan. Tesis halaman baru dalam sejarah berpendapat bahwa perubahan akan membuat orang terbebas dari sangkar besi. Struktur institusi lama telah tergantikan dengan organisasi yang fleksibel. Sebagai gantinya geografi baru kekuasaan, pusat mengendalikan pinggiran atas kekuasaan dalam institusi dengan perantara lebih sedikit birokrasi. Bentuk kekuasaan baru menghindari otoritas institusional, memiliki kapital sosial rendah. Defisit kesetiaan/loyalitas, kepercayaan informal, dan akumulasi pengetahuan institusi dihasilkan dalam organisasi *cutting-edge* (meringkas). Untuk individu, bahkan ketika nilai bekerja dapat tetap kuat, prestise moral pekerjaan itu sendiri berubah; tenaga kerja *cutting-*

edge mengalami disorientasi dua elemen kunci dari etika kerja, menanggukkan kepuasan dan berpikir strategis jangka panjang. Dengan cara ini, sosial telah berkurang; kapitalisme tetap. Ketidaksetaraan menjadi semakin terikat dengan isolasi. Ini adalah transformasi yang aneh yang telah ditangkap oleh politisi sebagai model dari "reformasi" di wilayah publik.

D. Mentalitas Manusia Bugis-Makassar Sebagai Alternatif

Suku Bugis-Makassar sejak dahulu telah dikenal sebagai pelaut ulung dan suka bekerja keras. Mereka begitu gigih mengarungi lautan lepas hingga mencapai wilayah benua Afrika. Mereka juga senang merantau dan mengarungi samudera untuk bermukim di satu wilayah baru, dan membangun peradaban. Hasil dari kerja keras mereka setidaknya dapat ditemukan dalam berbagai artefak peninggalan budaya. Sampai sekarang hasil karya tersebut masih ada yang dilestarikan, seperti misalnya tenun sutra, perahu phinisi, dan lain sebagainya. Panen hasil bumi yang melimpah dapat juga menjadi bukti kegigihan suku ini dalam bekerja. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat etos kerja yang melandasi berbagai hasil karya dari suku Bugis-Makassar

Etos kerja manusia Bugis-Makassar dapat diketahui melalui penelaahan terhadap mentalitas manusia Bugis-Makassar. Mentalitas manusia Bugis-Makassar terdapat dalam konsep *panngadêrrêng*. *Panngadêrrêng* merupakan sistem norma dan aturan adat yang mengandung nilai-nilai normatif serta meliputi hal-hal ketika seseorang dalam tingkah lakunya dan dalam memperlakukan diri di dalam kegiatan sosial, bukan saja merasa “harus” melakukannya, melainkan lebih jauh dari itu, ialah adanya semacam “larutan perasaan” bahwa seseorang itu adalah bagian integral dari *panngadêrrêng* (Mattulada, 1982: 133).

Hakikat dari *panngadêrrêng* ini adalah memelihara dan menumbuhkan harkat dan nilai-nilai insani. Jadi, jika pelaksanaan aturan adat hanya sebatas kebiasaan tanpa merenungkan hakikat aturan adat tersebut maka itu bukan *panngadêrrêng*. Inilah perbedaan *panngadêrrêng* dengan adat, sebab adat mengandung arti kebiasaan, dapat mengandung kesewenang-wenangan dan akhirnya diterima sebagaimana adanya dalam sistem sosial. Tetapi *panngadêrrêng* tidak, ia menjunjung tinggi persamaan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, *panngadêrrêng* mendapatkan kekuatannya dari *siri*’, sebagai nilai esensial dari manusia (Mattulada, 1982: 135).

Panngadêrrêng dibangun oleh banyak unsur yang saling menguatkan. *Panngadêrrêng* meliputi *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari'*, *sara'*. Semua itu diperteguh dalam satu rangkuman yang melatar-belakanginya, yaitu satu ikatan yang paling mendalam, *siri'*. *Siri'* inilah yang menjadi azas terdalam dari semua kegiatan manusia memperlakukan dirinya dalam aspek-aspek *panngadêrrêng* lainnya. Mattulada (1982: 141) menyatakan bahwa ada empat azas dasar yang terkandung dalam *panngadêrrêng*:

- a) Azas *Mappasilasa'e*, diwujudkan dalam manifestasi *ade'* agar terjadi keserasian dalam sikap dan tingkah laku manusia di dalam memperlakukan dirinya dalam *panngadêrrêng*. Di dalam tindakan operasionalnya ia menyatakan diri dalam usaha-usaha pencegahan (preventif), sebagai tindakan penyelamatan.
- b) Azas *Mappasisaue*, diwujudkan dalam manifestasi *ade'* untuk menimpakan deraan pada tiap-tiap pelanggaran *ade'* yang dinyatakan dalam bicara. Azas ini menyatakan adanya pedoman legalitas dan represif yang sangat konsekuen dijalankan. Di samping itu, azas ini dilengkapi dengan *siariwawong* yang diwujudkan dalam manifestasi *ade'*, untuk menyatakan adanya perlakuan yang sama, mendidik setiap orang untuk mengetahui yang benar dan yang salah.
- c) Azas *Mappasenrupae* diwujudkan dalam manifestasi *ade'* untuk memelihara kontinuitas pola yang sudah ada lebih dahulu guna stabilisasi perkembangan-perkembangan yang muncul.
- d) Azas *Mappallaisêng* diwujudkan dalam manifestasi *ade'* untuk memberikan batas-batas yang jelas tentang hubungan antara manusia dan lembaga sosialnya sehingga masyarakat terhindar dari ketiadaan ketertiban, *chaos* dan lain-lain.

Panngadêrrêng dapat juga berarti aktualisasi seorang individu memanusiaikan diri dan merealisasi perwujudan masyarakat, membangun interaksi manusia dengan sesamanya dan dengan lembaga kemasyarakatannya (Mattulada 1996: 37). Manusia sebagai individu adalah bagian dari *Panngadêrrêng* sebagai pendukung kebudayaannya, ia terjelma menjadi pribadi *siri'*, ia pun bermartabat dan berharkat memikul tanggung jawab dan memiliki hak untuk mempertahankannya dengan segala yang ada padanya. Dengan *siri'* itu seseorang membawa diri berinteraksi dengan sesamanya. Dalam interaksi dan kebersamaan itu terjelma konsep *pesse*. *Pesse* adalah sikap yang setara dengan *siri'* yang ditujukan terhadap upaya memelihara kebersamaan atau solidaritas,

kesetiakawanan antar pribadi *siri'*. *Pesse* menyatakan diri dalam kesadaran sikap kolegiat. *Siri'* dan *pesse* menyatu dalam kesadaran makna (Syamsuddin, 2009: 13).

Mattulada (1982: 62) menyatakan bahwa persoalan *siri'* bagi orang Bugis memiliki berbagai segi, sehingga terkadang diberi isi dan tanggapan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang sangat emosional. Banyak orang menafsirkan *siri'* seringkali disamakan saja dengan perasaan malu, dan bahkan seringkali juga diandaikan dengan masalah pelanggaran adat perkawinan seperti kawin lari (*sillariang*) dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa untuk mencari hakikat *siri'* tidak mungkin hanya memandang salah satu aspek saja atau hanya memperhatikan perwujudannya saja. Hal itu mudah dimengerti karena *siri'* adalah satu hal yang abstrak dan hanya akibat kongkretnya saja yang dapat diamati dan diobservasi. Akibat kongkret itu dapat diamati dalam fenomena sosial, seperti observasi yang dapat dilakukan terhadap orang Bugis-Makassar yang mudah tersinggung, lekas menggunakan kekerasan dan membalas dengan pembunuhan.

Siri', jika ditinjau secara metafisik/ ontologis, memiliki makna yang esensial. Hal itu dapat dipahami dari anggapan bahwa *siri'* bagi orang Bugis masih tetap merupakan sesuatu yang melekat pada martabat kehadirannya sebagai manusia pribadi dan sebagai warga dari satu persekutuan. Orang Bugis-Makassar menghayati *siri'* itu sebagai panggilan yang mendalam dalam diri pribadinya, untuk mempertahankan satu nilai yang dihormatinya. Sesuatu yang dihormati, dihargai, dan dimilikinya memiliki arti esensial, baik bagi diri maupun bagi persekutuannya (Mattulada, 1982: 62).

Paseng dalam sebuah kesusasteraan Bugis (paseng dan amanat-amanat dari leluhurnya) menyatakan, "*utettong ri-ada'e, najagainnami siri'ku*", yang berarti saya taat kepada adat, karena *siri'* saya dijaganya. Mattulada (1982: 63) memberikan tiga ungkapan dalam bahasa Bugis (yang terwujud dalam kesusasteraan paseng dan amanat-amanat dari leluhurnya) yang dapat dijadikan petunjuk dalam memahami hakikat *siri'*. Pertama, *siri' emmi ri onroang ri lino*, artinya hanya untuk *siri'* itu sajalah kita hidup di dunia. Dalam ungkapan ini termaktub arti *siri'* sebagai hal yang memberi identitas sosial dan martabat kepada seseorang. Hanya kalau ada martabat atau harga diri, hidup ada artinya. Kedua, *materi siri'na*, artinya mati dalam *siri'* yang mengandung makna mati demi menegakkan martabat atau harga diri. Mati yang demikian dianggap satu hal yang terpuji dan terhormat. Ketiga, *mate siri'*, artinya orang

yang sudah hilang harga dirinya dan tak lebih dari bangkai hidup. Orang Bugis-Makassar yang merasa *mate siri'* akan melakukan amuk (*jallo'*), hingga ia mati sendiri. *Jallo'* yang demikian disebut *napatetonngi siri'na*, artinya ditegakkan kembali martabat dirinya.

Hamid Abdullah dalam Christian Pelras (2006: 251) menyatakan bahwa *siri'* merupakan unsur prinsipial dalam diri manusia Bugis-Makassar dalam kehidupannya. Tak satu pun nilai yang paling berharga untuk dibela dan dipertahankan di muka bumi selain *siri'*. *Siri'* adalah jiwa mereka, harga diri mereka dan martabat mereka. Sebab itu, untuk menegakkan dan membela *siri'* yang dianggap tercemar atau dicemarkan oleh orang lain, maka manusia Bugis-Makassar akan bersedia mengorbankan apa saja termasuk jiwanya yang paling berharga demi tegaknya *siri'* dalam kehidupan meeka.

Hakikat *siri'* hendaknya dilihat dari segi aspek nilai *panngaderreng* sebagai wujud kebudayaan yang menyangkut martabat dan harga diri manusia dalam lingkungan hidup kemasyarakatan. Nilai-nilai *panngaderreng* yang amat dijunjung tinggi Orang Bugis, yang dapat membawa kepada peristiwa *siri'* dapat disimpulkan ke dalam lima hal berikut:

1. Sangat memuliakan hal yang menyangkut soal kepercayaan.
2. Sangat setia memegang amanat atau janji yang telah dibuatnya.
3. Sangat setia kepada persahabatan.
4. Sangat mudah melibatkan diri kepada persoalan orang lain.
5. Sangat memelihara akan ketertiban adat kawin mawin.

Lima hal tersebut disarikan dari lima aspek *panngaderreng*, yaitu *ade'*, *bicara'*, *rapang*, *wari'*, dan *sara'* yang merupakan hal yang paling banyak menimbulkan ekses amuk (*jallo'*) berupa pembunuhan, pemberontakan, pembangkangan dan meninggalkan negerinya sendiri dengan dimotori oleh semangat *siri'*. Jadi, lumrah apabila amuk (*jallo'*) berupa pembunuhan, pemberontakan, pembangkangan dilakukan oleh orang Bugis baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, yang hendaknya agar diperhatikan pertama kali pada konsepsi *siri'* mereka. Apabila motif peristiwa itu didorong oleh konsepsi *siri'* maka untuk pembenahannya juga harus dengan menggunakan nilai-nilai *panngaderreng* (Mattulada, 1982: 64).

Nilai-nilai itu, sebagaimana dikatakan oleh Latoa, ada empat hal yang memperbaiki kekeluargaan (pergaulan hidup). Pertama, kasih sayang dalam keluarga. Kedua, saling memaafkan yang kekal.

Ketiga, tak segan saling memberikan pertolongan/ pengorbanan demi keluhuran. Keempat, saling mengingatkan untuk berbuat kebajikan. Ahli-ahli Lontara mengatakan: “bukankah dengan demikian berarti bahwa *ade'* ada buat kasih sayang, *bicara* ada buat saling memaafkan, *rapang* ada buat saling memberi pengorbanan demi keluhuran, dan *wari'* ada buat mengingatkan perbuatan kebajikan?” (Mattulada, 1982: 47).

Dengan demikian tujuan hidup menurut *panngadereng* adalah untuk melaksanakan tuntutan fitrah manusia guna mencapai martabatnya, yaitu *siri'*. Bila *panngadereng* dengan segala aspeknya tidak ada lagi maka akan terhapuslah fitrah manusia, hilanglah *siri'*. Tidak ada lagi artinya hidup bagi orang Bugis. Jadi jawaban yang paling tepat terhadap pertanyaan mengapa orang Bugis taat kepada *panngadereng* ialah karena *siri'* (Mattulada, 1982: 64). Karena itu tepatlah kiranya kalau dikatakan bahwa *siri'* pada hakikatnya adalah perwujudan diri.

Pandangan ini juga dapat dilihat pada satu aliran dalam etika yang dikenal dengan *eudaimonia*. Aliran ini memandang perwujudan diri sebagai norma. Sejak zaman Yunani Kuno perwujudan diri dikenal dalam aliran etika dan pendidikan. Aliran ini memandang yang baik adalah 'pengisian sesuatu'. Sesuatu yang hendak diisi tersebut adalah diri manusia. Perwujudan diri itu sendiri berarti perkembangan secara harmonis segala sesuatu kesanggupan manusia yang normal (Zubair, 1987: 117).

Eudaimonia berarti dipimpin secara langsung oleh *daemon* (jin) yang baik. Aristoteles memandang *eudamonia* lebih dari sekedar kepuasan batin yang bersifat sementara yang dikenal dengan istilah bahagia, tetapi dianggap sebagai keberhasilan seseorang mengalami penghidupan yang baik. *Eudamonia* dicapai dengan melalui proses waktu yang lama dan keadaan yang lebih stabil. Di dalam proses itu tercermin terjadinya perkembangan fungsi jiwa yang lengkap yang menjadikan manusia makhluk yang berbudi bersama anggota masyarakatnya (Zubair, 1987: 118).

E. Reorientasi Kerja:

dari Akumulasi Kapital ke Perwujudan Diri

Fakta pengangguran di Indonesia jelas merupakan satu ironi. Negara yang kaya akan hasil bumi dan komoditas ini masih menyisakan potret suram. Pengelolaan kekayaan tidak terlihat berorientasi ke arah kesejahteraan bersama. Meskipun perlu diakui bahwa kesetaraan ekonomi jelas merupakan sesuatu yang utopis.

Akan tetapi, ketidaksetaraan dalam bidang ekonomi menjadi penyebab utama kesewenangan terhadap mereka yang kurang beruntung. Jaminan sosial tidak berfungsi dengan baik. Banyak fungsi negara yang seharusnya meringankan beban mereka justru tidak memihak kepada mereka yang membutuhkan. Pergeseran nilai itu tergerus pada penggusuran kepentingan bersama.

Kepentingan bersama yang menjadi fundamen dalam pendirian negara ini telah ternodai oleh desakan arus globalisasi. Globalisasi menciptakan ruang untuk terjadinya relasi antar budaya. Pertemuan antar budaya itu menjadi arena dalam pertarungan nilai antar pendukung kebudayaan. Satu hal yang patut disayangkan ketika kekuasaan nilai materialisme temporal mendesak identitas kepribadian bangsa yang telah lama mengakar. Reduksi nilai tidak dapat lagi terhindarkan sehingga dapat berakibat pada terjadinya degradasi nilai.

Demikian halnya tercermin dalam konsep kerja pada budaya kapitalisme baru. Nilai kerja yang semula bermakna perjuangan eksistensi, atau sebagai modus eksistensi seseorang tereduksi menjadi upaya untuk menumpuk kekayaan. Modal ekonomi menjadi muara dan hulu dari seluruh karakter modal yang ada. Modal sosial tercampakkan dari ranah kekuasaan. Dengan demikian kekuasaan berbasis pada modal ekonomi, yang berarti pula kekuasaan dikendalikan secara terpusat oleh nilai nominal mata uang.

Uang menjadi sumber keberuntungan dan sesungguhnya juga sekaligus menjadi sumber malapetaka yang terjadi dewasa ini. Ketamakan terhadap uang telah menyingkirkan berbagai aspek sosial. Hal ini dapat dilihat dari bobroknya pengelolaan kekayaan negara. Salah satunya tercermin dalam pajak yang ditarik dari warga negara sesungguhnya secara prinsip bukanlah beban bagi mereka. Akan tetapi, pajak saat ini bagai momok dan sekaligus aib negara. Keengganan masyarakat membayar pajak semakin meningkat. Hal ini tentu bukan kondisi yang baik demi pencapaian tujuan negara.

Dua puluh delapan tahun yang lalu pada tahun 1983 telah mulai dicanangkan Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan (RUU PPh) tahun 1984. RUU ini mengincar setiap manfaat ekonomi yang diperoleh seseorang dari satu usaha. Hal itu ditujukan demi meningkatkan penerimaan pajak non minyak. Pada kala itu harga minyak tidak begitu menjanjikan dan tentu ladang minyak bukan sumber pendapatan negara yang dapat diandalkan untuk

jangka panjang. Pemerintah, ketika itu, mengajukan tiga naskah RUU tentang pajak penghasilan 1984 yang mencakup, pertama, ketentuan umum perpajakan, kedua, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Tiga rancangan naskah itu diharapkan memberi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi wajib pajak maupun pemungut pajak (Tempo, 19 November 1983).

Pada kenyataannya hal itu tak kunjung terwujud. Dahulu, pada saat konsep ekonomi kerakyatan yang diusung Bung Hatta mengalami “mati suri”, Prof Mubyarto mengusung konsep Ekonomi Pancasila yang berorientasi pada nilai kerakyatan. “Roh” perekonomian negara ini tentu saja terletak pada keadilan sosial yang terpatrit pada asas kebersamaan dan kekeluargaan. Akan tetapi keadilan sosial yang menjadi roh perekonomian itu juga dijiwai oleh sila-sila Pancasila sebelumnya. Keadilan sosial yang dijiwai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dan Permusyawaratan Perwakilan. Tanpa rohnya, perekonomian negara ini menjadi seperti jasad tanpa jiwa.

Harapan akan keadilan sesungguhnya yang menjadi landasan Ekonomi Pancasila. Landasan tata ekonomi negara ini tentu tidak lepas dari dasar negara, Pancasila. Penekanan khusus pada sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini yang kemudian mendasari pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan perundangan yang berlaku tentang pengelolaan perekonomian negara. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi di tingkat makro saat ini memiliki kecenderungan bertujuan pada proses kapitalisasi. Implikasi dari kebijakan itu tentu untuk penguatan modal. Dengan begitu mempengaruhi elemen perekonomian yang lebih fundamental, seperti juga misalnya pada dunia kerja.

Ekonomi kerakyatan yang merupakan sebutan lain untuk ekonomi Pancasila ialah perekonomian yang merakyat. Kebijakan-kebijakannya memihak pada rakyat bukan sekedar pada para pemilik modal. Bukan pula pada aparat yang senang “membocorkan” pendapatan negara melalui pajak. Banyak pemuda di negara ini yang terpaksa kehilangan hak dan kesempatannya untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Kesempatan itu berupa peluang untuk mendapatkan jaminan pekerjaan layak dan keberlangsungan usaha jangka panjang. Peluang usaha menjadi semakin sempit dengan berkembangnya industri dan usaha besar

yang lebih mendapat kemudahan dibanding dengan mereka yang belum berpengalaman. Hal itu disertai juga dengan kurangnya pembimbingan dan keterarahan pengembangan iklim usaha.

Gejala sistemik ini diakibatkan oleh kesalahpahaman orientasi kerja dan nilai yang tereduksi pada sesuatu yang bersifat material semata. Kapitalisme baru menjadi aktor intelektual di balik itu semua. Kerja yang seharusnya menjadi arena untuk mengaktualisasikan potensi diri sebagai bagian tak terpisahkan dari jati diri manusia berubah menjadi ajang pertarungan rutinitas demi proses akumulasi kapital segelintir penguasa. Untuk melepaskan diri dari persoalan ini maka dibutuhkan penguatan dan revitalisasi nilai-nilai alternatif yang membandingi desakan arus proses kapitalisasi tersebut.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan kembali pada kearifan lokal dan nilai yang terkandung pada falsafah dari berbagai suku pendukung kebudayaan Nusantara. Suku yang memiliki daya saing tinggi di kancah internasional dan telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu di antaranya adalah suku Bugis-Makassar. Suku Bugis-Makassar terkenal sebagai pelaut ulung dan pekerja keras. Di balik itu upaya dan kerja keras mereka ternyata didasari oleh nilai yang senantiasa melekat pada setiap individu manusia suku Bugis-Makassar yang dikenal dengan istilah *siri'*. *Siri'* itu jelas merupakan spirit yang metafisik demi upaya perwujudan diri yang bersifat lebih kongkret. Oleh karena itu maka tidak salah apabila dikatakan bahwa *siri'* merupakan landasan dalam etos kerja suku Bugis-Makassar.

Berdasar pada wacana di atas maka disorientasi kerja yang terjadi pada masyarakat Indonesia dapat dibenahi dengan melakukan upaya reorientasi kerja. Reorientasi itu berupa kehendak untuk membenahi kerangka pemahaman pada bentuk kesadaran baru melalui penanaman nilai yang digali dari warisan budaya bangsa. Kesadaran baru tersebut nantinya diharapkan dapat disebarluaskan melalui komunikasi efektif dan media edukasi. Proses itu tentu tidak semudah sebagaimana yang dibayangkan. Langkah untuk menuju perwujudannya harus segera direalisasikan demi keberlangsungan tradisi dan jati diri bangsa.

Upaya itu tidak bertujuan untuk mengarahkan konsep kerja pada kecenderungan paham tradisionalisme. Akan tetapi, lebih kepada upaya menangkal desakan hegemonisasi dan dominasi

segelintir orang yang terbujuk pada kuasa kapitalisme. Nilai merupakan sesuatu yang bersifat perennial dan merupakan kualitas abstrak yang melandasi tindakan manusia. Ibarat energi, nilai tak dapat diciptakan dan tak dapat dimusnahkan. Nilai inheren dalam eksistensi manusia. Ia telah ada sejak adanya keberadaan manusia. Ia hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oleh karenanya satu nilai dapat dikaburkan oleh nilai yang lain, tetapi tidak menghilangkan eksistensinya.

Dengan demikian berarti perlu dipahami bahwa nilai yang terkandung pada etos kerja suku Bugis-Makassar tidak berarti menghilangkan nilai pada konsep kerja dalam budaya kapitalisme baru. Persoalan ini ibarat persoalan tarik ulur. Pada kenyataannya tidak semudah demikian, karena transformasi nilai tidak semudah seperti menarik pada seutas tali. Nilai senantiasa berimplikasi pada konsekuensi logis yang menyertainya. Seperti misalnya jika dikatakan bahwa kerja untuk perwujudan diri. Akan muncul sebuah persoalan baru yang lebih besar yaitu, setelah perwujudan diri kelak akan jadi apa?

Pemahaman demikian dapat diluruskan dengan menata kembali relasi antara akumulasi kapital dan perwujudan diri. Kedua nilai itu memiliki relasi yang tidak saling meniadakan. Relasi kedua nilai itu hanya perlu untuk ditata ulang. Jika saat ini yang lebih dominan ialah bekerja untuk menumpuk kekayaan demi tercapainya perwujudan diri, maka perlu untuk ditata menjadi, bekerja demi perwujudan diri akan disertai dengan peningkatan harga diri yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup. Apa jaminan dari pernyataan itu? Jaminannya adalah kesakralan nilai spiritualitas dalam pribadi yang tidak terbandingi oleh berapa pun harga yang harus dibayar. Dahulu terdapat slogan bahwa “orang jujur bernasib mujur”. Sekarang slogan itu telah berubah menjadi “orang jujur akan cepat hancur”.

Hal itulah yang perlu diluruskan pada upaya kritik terhadap konsep kerja dalam budaya kapitalisme baru ini. Oleh karenanya reorientasi konsep kerja masih belum terlambat. Agenda untuk perubahan masih terbuka lebar. Hal itu tidak dapat lepas dari niat penentu kebijakan di negara ini. Jika orientasi materi telah dapat disisihkan secara perlahan melalui peralihan kepada sesuatu yang spiritual, maka tidak mustahil hal itu dapat diwujudkan.

F. Penutup

Kesimpulan yang dapat dikemukakan dari penulisan ini ialah bahwa budaya kapitalisme baru telah menyebar pada hampir setiap wilayah di berbagai negara. Budaya tidak sekedar berarti kebiasaan bangsa atau suku pendukung satu kebudayaan di wilayah tertentu. Budaya dapat berarti lebih dari sekedar batas wilayah negara. Dalam arti itulah budaya kapitalisme baru dapat dipahami, yaitu kesamaan bentuk pola tindak dan kebiasaan dari sebagian besar umat manusia yang hidup dan beraktivitas di penjuru dunia. Budaya ini telah menularkan konsep kerja yang berakibat pada disorientasi kerja dan defisit sosial. Oleh karena itu memerlukan satu alternatif wacana yang dikembangkan dari nilai-nilai yang berlainan dari padanya.

Suku bangsa di Indonesia yang begitu beragam menyimpan berbagai nilai yang dapat digali kembali sebagai wacana alternatif. Salah satu di antaranya adalah nilai yang terdapat pada suku Bugis-Makassar. Suku Bugis-Makassar telah dikenal sejak dahulu kala sebagai pelaut ulung dan pekerja keras. Di balik kenyataan itu semua ternyata tersimpan etos kerja yang terdapat dalam mentalitas suku Bugis-Makassar. Mentalitas suku Bugis-Makassar dapat dipahami melalui konsep *panngadereng*. Konsep *panngadereng* ini dilandasi oleh spirit yang terkandung pada setiap individu suku Bugis-Makassar yang disebut dengan *siri'*. *Siri'* inilah yang menjadi kualitas abstrak dan landasan segala tindakan manusia Bugis-Makassar termasuk di antaranya dalam memaknai hakikat kerja.

Upaya kritik terhadap konsep kerja dalam budaya kapitalisme baru dilakukan melalui reorientasi kerja dari akumulasi kapital kepada perwujudan diri. Salah satu slogan yang harus diserukan adalah "prestasi kerja akan disertai dengan peningkatan harga diri". Harga diri tentu merupakan sesuatu yang abstrak dan oleh karenanya tidak dapat terbandingi dengan harga berapa pun juga. Reorientasi ini juga berarti upaya untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan relasi antara yang material dan spiritual. Dengan demikian persoalan pengangguran di Indonesia harus diselesaikan secara komprehensif melalui upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berarti tidak hanya semata-mata secara material saja, melainkan juga pembangunan secara spiritual.

G. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, 2011, **Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi**, Edisi 10 Maret 2011, Katalog BPS, Jakarta.
- Dillard, D., 1987, "Kapitalisme" dalam Rahardjo, D., **Kapitalisme Dulu dan Sekarang**, LP3ES, Jakarta.
- Dobb, M., 1987, "Perkembangan Kapitalisme" dalam Rahardjo, D., **Kapitalisme Dulu dan Sekarang**, LP3ES, Jakarta.
- Dowd, Douglas, 2000, **Capitalism and It's Economics: A Critical History**, Pluto Press, London.
- Mattulada, 1982, **Latoa**, Hasanuddin University Press, Makassar.
- _____, 1996, "Demokrasi dalam Perspektif Budaya Bugis-Makassar" dalam Mohammad Najib (ed.), dkk., **Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara**, LKPSM, Yogyakarta.
- Pelras, Christian, 2006, **Manusia Bugis**, Terjemahan: Abdul Rahman Azis dkk., Nalar, Jakarta.
- Sairah, A. R. 2010. **Epistemologi Budaya Kapitalisme Baru**. Tesis Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Saksono, G., 2009, **Neoliberalisme VS Sosialisme Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan**, Forkoma PMKRI, Yogyakarta.
- Sennet, Richard, 2006, **The Culture of The New Capitalism**, Yale University Press, New Haven and London.
- Storper, Michael, 2001, "*Lived Effects of The Contemporary Economy: Globalization, Inequality, and Consumer Society*" dalam Comaroff, Jean, Comaroff, Jhon L. (ed.), **Millenial Capitalism and The Culture of Neoliberalism**, Duke University Press, London.
- Syamsuddin, Mukhtassar, 2009, **Pendekatan Fenomenologis dalam Studi Perbandingan Etos Kerja Manusia Bugis-Makassar dan Bangsa Jepang**, Laporan Penelitian Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Weber, Max, 1959, **The Protestant Ethics and The Spirit of Capitalism**, Charles Scribners Soon, New York.
- Zubair, Ahmad Charis, 1987, **Kuliah Etika**, Rajawali Pers, Jakarta.

Sumber lain:

- Majalah Tempo Edisi tanggal 19 November 1983 dalam artikel **1984: Tahun Pajak buat Semua**.